

ABSTRAK

Infrastruktur jalan memiliki peran krusial dalam meningkatkan aksesibilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan infrastruktur jalan kerap dipengaruhi oleh dinamika politik yang memengaruhi pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan mekanisme pengawasan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola infrastruktur jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti halnya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta masyarakat setempat. Teori rezim diterapkan untuk menganalisis pola interaksi serta peran aktor dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan jalan di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan proyek, serta pengaruh kepentingan politik dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, kerusakan jalan yang disebabkan oleh tingginya beban kendaraan berat dan minimnya perawatan turut berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan dan terganggunya aktivitas masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, serta sektor swasta, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola infrastruktur jalan. Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan, menjadi faktor kunci agar pembangunan infrastruktur jalan dapat berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Tata Kelola Infrastruktur, Rezim, Baturaja Timur, Baturaja Barat.*